

**INTEGRASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI  
DALAM MATA PELAJARAN PAI DAN BUDI PEKERTI  
DI SMK N JATENG DI PURBALINGGA**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan (S.Pd.)**

**IAIN PURWOKERTO**

**Oleh:  
FAIZATUN NI'MAH  
NIM. 1617402058**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2020**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau menurut *Webster Student Dictionary* dikutip oleh Eddy dalam jurnalnya yang berjudul *United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia* adalah *corruptus*, yang sesungguhnya berasal dari suatu kata latin yang lebih tua yakni *corrumpere*. *Corrumpere* dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>2</sup> Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikutip oleh Nilawati dalam jurnalnya yang berjudul *Keterlibatan Perempuan dalam Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang* korupsi memiliki arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>3</sup>

Di Indonesia sendiri, korupsi telah berkembang pesat dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi dianggap merusak karena sifatnya yang merugikan masyarakat dan negara. Hal ini mengacu pada pemberitaan yang dipublikasikan oleh media lebih banyak menyoroti kasus yang melibatkan kekuasaan dan pemerintahan.<sup>4</sup> Seperti kasus suap SKK Migas, wisma atlet Palembang, proyek Hambalang, dan sebagainya. Bahkan, satu hal yang menarik untuk diingat adalah adanya sinyalemen yang mengatakan bahwa korupsi sekarang ini sudah membudaya dan merusak karakter bangsa.<sup>5</sup>

Hingga saat ini, upaya pemberantasan korupsi sejatinya telah banyak dilakukan. Pemberantasan KKN telah menjadi agenda utama gerakan reformasi

---

<sup>2</sup> Eddy O.S Hiariej, “United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 1, 2019, hlm. 113.

<sup>3</sup> Nilawati, “Keterlibatan Perempuan dalam Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang”, *Jurnal Intizar*, Vol. 20, No. 2, 2014, hlm. 389.

<sup>4</sup> Chatrina Darul Rosikoh dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Tarmizi, 2016), hlm. 1.

<sup>5</sup> Abu Dharin, *Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Ibtidaiyah*, (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018), hlm. 2.

yang bergulir sejak tahun 1998 dan telah ada beberapa perangkat hukum yang mengatur soal pemberantasan KKN dan telah diciptakan aparat pemerintah yang bersih dan bertanggungjawab yang ditetapkan sejak tahun 1998, yaitu antara lain adalah TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan ternyata belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Korupsi yang merupakan penyakit kronis Orde Baru, justru berkembang menjadi gaya korupsi baru di orde transisi sekarang ini.<sup>6</sup>

Berbagai perubahan telah dilakukan, seperti salah satu yang populer pada era reformasi sekarang ini adalah tentang reformasi birokrasi terkait masalah pegawai pemerintah yang dinilai korup. Reformasi birokrasi dilaksanakan dengan harapan dapat menghilangkan budaya-budaya buruk birokrasi yaitu korupsi. Reformasi birokrasi ini pada umumnya diterjemahkan oleh instansi-instansi pemerintah sebagai perbaikan kembali sistem remunerasi (penggajian) pegawai. Akan tetapi, pada kenyataannya, tindakan korupsi masih terus terjadi walaupun sudah diberlakukan remunerasi gaji bagi pegawai pemerintah.<sup>7</sup>

Hal ini dikarenakan penyebab terjadinya korupsi tidak hanya permasalahan ekonomi. Salah satu akar yang patut diduga sebagai penyebab tindakan korupsi adalah integritas dan karakter para pelakunya.<sup>8</sup> Pegawai dengan gaji rendah sekalipun jika ia berkarakter mulia pasti tidak akan melakukan korupsi. Sebaliknya, yang bergaji tinggi tetapi buruk karakternya justru besar kemungkinan melakukan korupsi. Terjadinya korupsi juga

---

<sup>6</sup> Amin Haedari, *Pendidikan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2010), hlm. 222.

<sup>7</sup> Abu Dharin, *Pendidikan Antikorupsi...*, hlm. 1.

<sup>8</sup> Chatrina Darul Rosikoh dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi...*, hlm. 109.

dikarenakan kurangnya pengetahuan atau pemahaman tentang korupsi itu sendiri.<sup>9</sup>

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2018 yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII) pada Januari 2019 menunjukkan bahwa Indonesia naik satu tingkat yaitu dari yang tadinya stagnan pada poin 37 di tahun 2017 dan 2016 menjadi 38 pada tahun 2018. Menurut Laode M. Syarif, selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kenaikan ini cukup tipis mengingat sudah 74 tahun lamanya Indonesia merdeka namun kesejahteraan masih seperti sekarang. Seharusnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sudah mencapai 50.<sup>10</sup> Indonesia masih masuk raport merah dalam pemberantasan korupsi.

Upaya untuk mencegah atau memberantas korupsi tidak hanya dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga antikorupsi seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan lain sebagainya. Akan tetapi, bisa juga melalui jalur pendidikan dengan menerapkan pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi. Yaitu dengan memberikan kemampuan penguasaan pengetahuan terkait korupsi serta pengenalan nilai-nilai antikorupsi yang berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai, dan pengamalan nilai antikorupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari.<sup>11</sup> Nilai-nilai antikorupsi tersebut antara lain; kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Pendidikan antikorupsi bukan sekedar media bagi transfer ilmu pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku korupsi.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 10.

<sup>10</sup>Jurnalis, "KPK: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Harusnya di Atas 50 Poin", <https://nasional.okezone.com/amp/2019/0817/337/2093172/kpk-indeks-persepsi-korupsiindonesia-harusnya-di-atas-50-poin?page=2> diakses pada Rabu, 18 Desember 2019, pukul 10.00 WIB.

<sup>11</sup> Abu Dharin, *Pendidikan Antikorupsi...*, hlm. 22.

<sup>12</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi...*, hlm. 38.

Beberapa alasan betapa pentingnya pendidikan antikorupsi diaplikasikan di sekolah diantaranya: *pertama*, dunia pendidikan khususnya lembaga pendidikan pada umumnya memiliki seperangkat pengetahuan (*knowledge*), untuk memberi pencerahan terhadap berbagai kesalahan pemahaman dalam usaha pemberantasan korupsi. Hal itu dikarenakan sampai saat ini definisi korupsi baru sebatas pada pengertian yang bersifat legal-formal. Sementara, berbagai bentuk praktik korupsi telah tumbuh subur dan menggurat akar di tengah-tengah masyarakat kita. Dalam situasi seperti ini, lembaga pendidikan dengan sumber yang dimiliki, dapat menjadi referensi untuk memecahkan problematika praktik korupsi.<sup>13</sup>

*Kedua*, lembaga pendidikan penting dilibatkan dalam pemberantasan korupsi karena memiliki jaringan (*networking*) yang kuat hingga ke seluruh penjuru tanah air. Pelibatan lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi akan menjadikan usaha pemberantasan korupsi dapat menjelma sebagai gerakan yang bersifat masif. Dengan gerakan yang bersifat masif ini, diharapkan bahwa pada saatnya bangsa Indonesia dapat keluar dari problem korupsi.<sup>14</sup>

*Ketiga*, jika ditelisik satu persatu latar belakang sosial pelaku tindak korupsi maka dapat dikatakan bahwa mayoritas mereka adalah orang-orang yang berpendidikan. Mereka rata-rata bergelar sarjana. Selain faktor kesengajaan untuk memperkaya diri, sangat mungkin perbuatan mereka tersebut dilakukan karena faktor kurangnya pengetahuan tentang seluk-beluk tindak pidana yang dapat dikategorikan korupsi.<sup>15</sup>

Dengan demikian, ide memasukkan kurikulum antikorupsi dalam pendidikan tingkat dasar (SD/MA) hingga perguruan tinggi (PT/Universitas) sebagaimana digagas KPK belum lama ini, patut disikapi secara cerdas. Transformasi sekaligus internalisasi nilai-nilai moralitas, sensibilitas sosial dan

---

<sup>13</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi...*, hlm. 41.

<sup>14</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi...*, hlm. 10.

<sup>15</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi...*, hlm. 42.

jagat tata nilai lainnya, bakal efektif melalui perantara bangku pendidikan. Khususnya, pendidikan dasar (SD-SMP) dan menengah (SMA).<sup>16</sup>

Karakteristik dasar anak didik SD-SMA adalah tengah menjalani tahapan-tahapan proses psikologis yang sangat dominan pada pembentukan karakternya. Karakter fase psikologis tersebut antara lain yaitu; anak didik menirukan segenap tata nilai dan perilaku disekitarnya, mulai masaknya organ-organ seksual, pengambilan pola perilaku dan nilai-nilai baru, idealis, serta pemantapan identitas diri. Oleh karena itu, jika dalam fase-fase perkembangan psikologis tersebut di atas diatur secara baik, struktur maupun bangun nilai kejujuran dan anti KKN, maka akan menjadi dasar yang kuat dalam melandasi sikap, langkah, dan gerak hidup mereka dimasa mendatang.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan Bapak Roni selaku guru mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti pada hari Kamis, 12 Desember 2019, SMK N Jateng di Purbalingga merupakan salah satu dari 23 sekolah di Jawa Tengah yang dijadikan *pilot*/percontohan sekolah penerapan pendidikan antikorupsi pada tahun 2019. Di SMK N Jateng sendiri telah dilakukan pemasangan banner-banner/pesan-pesan antikorupsi di tempat-tempat yang strategis sebagai upaya pendidikan antikorupsi. Selain itu, pendidikan antikorupsi di SMK N Jateng di Purbalingga juga telah diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran khususnya mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti.<sup>18</sup>

Bapak Roni mengatakan bahwa materi-materi Pelajaran PAI dan Budi Pekerti sendiri sebenarnya telah mengandung nilai-nilai antikorupsi. Contohnya saja materi kelas X semester 2 dengan judul materi “Perilaku Jujur”. Tema ini jelas akan memberi pemahaman tentang nilai antikorupsi yaitu kejujuran. Namun, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa pendidikan antikorupsi tidak hanya sampai pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi, akan tetapi berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai, pengamalan nilai

---

<sup>16</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi...*, hlm. 10.

<sup>17</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi...*, hlm. 11.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Roni selaku guru mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMK N Jateng di Purbalingga pada hari Kamis, 12 Desember 2019, pukul 08.30 WIB, di SMK N Jateng di Purbalingga.

antikorupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari, serta pemahaman apa itu korupsi sendiri. Hal ini dimaksudkan agar nantinya akan tercipta pemahaman yang utuh yang pada akhirnya menimbulkan perilaku-perilaku antikorupsi dan melakukan perlawanan terhadap korupsi.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, salah satu strategi pengembangan integrasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMK N Jateng di Purbalingga adalah dengan menambah pengetahuan tentang korupsi pada tema tertentu agar siswa mendapat pemahaman tentang apa itu korupsi yaitu pada materi “Perilaku Jujur”. Mereka juga dididik untuk menjadi siswa yang berkarakter dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi melalui kegiatan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti, kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Contohnya yaitu, melaksanakan piket kelas untuk menanamkan nilai tanggung jawab, shalat berjamaah untuk menanamkan nilai disiplin, cinta lingkungan untuk menanamkan nilai kepedulian dan tanggung jawab, dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran tidak hanya sampai pada ranah kognitif, tetapi juga mencapai ranah afektif serta psikomotorik.<sup>20</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMK N Jateng di Purbalingga”.

## **B. Definisi Konseptual**

Untuk menghindari kemungkinan terjadi penafsiran berbeda dengan maksud utama penulisan dalam penggunaan kata pada judul penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa istilah pokok yang menjadi variabel penelitian ini. Beberapa istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Roni selaku guru mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMK N Jateng di Purbalingga pada hari Kamis, 12 Desember 2019, pukul 08.30 WIB, di SMK N Jateng di Purbalingga.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Roni selaku guru mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMK N Jateng di Purbalingga pada hari Kamis, 12 Desember 2019, pukul 08.30 WIB, di SMK N Jateng di Purbalingga.

## 1. Pendidikan antikorupsi

Secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu *paedagogie* yang terdiri dari kata *pais* yang berarti anak dan *again* artinya membimbing. Jadi, jika diartikan, *paedagogie* artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Romawi, pendidikan berasal dari kata *educate* yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada dari dalam. Sedangkan dalam bahasa Inggris pendidikan diistilahkan dengan kata *to educate* yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikutip oleh Muhibbin Syah, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.<sup>21</sup>

Antikorupsi merupakan sikap tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap tindakan korupsi. Antikorupsi merupakan sikap yang dapat mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Mencegah yang dimaksud adalah upaya meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan tindak korupsi dan serta berupaya menyelamatkan uang dan aset negara. Pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi saja, akan tetapi berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai, dan pengamalan nilai antikorupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari.<sup>22</sup>

Menurut Wibowo dikutip oleh Abu Dharin, pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Dalam proses tersebut, pendidikan antikorupsi bukan sekedar media bagi transfer pengetahuan, namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter, nilai antikorupsi dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan terhadap perilaku korupsi.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 10.

<sup>22</sup> Abu Dharin, *Pendidikan Antikorupsi...*, hlm. 22.

<sup>23</sup> Abu Dharin, *Pendidikan Antikorupsi...*, hlm. 24.



Pendidikan antikorupsi yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan sekolah untuk mencegah terjadinya korupsi dengan memberikan pemahaman tentang korupsi, pemahaman nilai-nilai antikorupsi, dan penanaman nilai-nilai antikorupsi agar nilai-nilai antikorupsi tersebut menjadi kebiasaan hidup sehari-hari sehingga melahirkan peserta didik yang antikorupsi dan mau melawan korupsi.

## 2. Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti

Kata Integrasi (*integration*) berarti percampuran, pengombinasian, dan perpaduan.<sup>24</sup> Integrasi adalah satu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah dan bercerai-berai.<sup>25</sup> Pendidikan Agama Islam di sekolah dapat didefinisikan sebagai suatu program pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Islam melalui proses pembelajaran, dikemas dalam mata pelajaran, diberi nama Pendidikan Agama Islam (PAI).<sup>26</sup> Pendidikan Agama Islam adalah sebuah mata pelajaran yang berfungsi untuk memberikan materi atau pengetahuan dan penanaman nilai-nilai Islam yang didasarkan dan dikembangkan dari 2 sumber pokok ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan sunah melalui kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas.

Integrasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti maksudnya yaitu pengembangan atau pelaksanaan pendidikan antikorupsi itu menyatu dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Integrasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti dilakukan melalui pengembangan materi karena memang sebagian materinya mengandung muatan nilai dan perilaku antikorupsi, melalui

---

<sup>24</sup> Novan Ardy Wiyani, *Konsep, Praktik, & Strategi Membumikan Pendidikan Karakter di SD*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 89.

<sup>25</sup> Ipin Aripin Mansyur, "Pengintegrasian Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran Ekstrakurikuler Mitra Citra Remaja (MCR) sebagai Upaya Pembinaan Akhlak Mulia di MAN Kiarakuda Ciawi Tasikmalaya", Tesis, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2012), hlm. 32.

<sup>26</sup> Syaiful Anwar, *Desain Pendidikan Agama Islam Konsep dan Aplikasinya dalam Pembelajaran di Sekolah*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), hlm. 21.

pengembangan metode, melalui pengembangan media, serta melalui pengembangan sumber belajar ketika berlangsungnya kegiatan pembelajaran.

Selanjutnya, untuk mencapai internalisasi nilai dan perilaku antikorupsi secara maksimal, pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti dilakukan pula dalam kegiatan ekstrakurikuler dan Budaya sekolah. Ekstrakurikuler terdiri dari 2 kata yaitu ekstra, dan kurikuler. Secara bahasa, kata ekstra mempunyai arti tambahan di luar yang resmi. Sedangkan kata kurikuler, mempunyai arti bersangkutan dengan kurikulum.<sup>27</sup>

Menurut Direktorat Pendidikan Kejuruan dalam buku Suryo Subroto yang berjudul “Proses Belajar Mengajar di Sekolah” dikutip oleh Choirunnia dalam skripsinya yang berjudul *Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan dalam Menanamkan Nilai Religius Peserta Didik di MI Jati Salim Gombang Pakel Tulungagung* ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka, dilaksanakan di sekolah atau luar sekolah agar lebih memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran dan kurikulum.<sup>28</sup>

Adapun menurut Saputra dikutip oleh Yayan dalam jurnalnya *Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler terhadap Prestasi Belajar IPS melalui Motivasi Belajar* kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran yang dilakukan di sekolah atau di luar sekolah dengan tujuan memperluas pengetahuan siswa.<sup>29</sup> Jadi, ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pembelajaran untuk menambah wawasan dan kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran baik dilaksanakan di sekolah

---

<sup>27</sup> Choirunnia Halimatussa'diah, “Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan dalam Menanamkan Nilai Religius Peserta Didik di MI Jati Salim Gombang Pakel Tulungagung”, Skripsi, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017), hlm. 13.

<sup>28</sup> Choirunnia Halimatussa'diah, “Pelaksanaan Kegiatan...”, hlm. 13.

<sup>29</sup> Yayan Inriyanin, dkk, “Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler terhadap Prestasi Belajar IPS Melalui Motivasi Belajar”, *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, Vol. 2, No. 7, 2017, hlm. 955.

maupun di luar sekolah. Ekstrakurikuler yang dimaksud oleh peneliti adalah ekstra yang bersifat keagamaan, yaitu ekstra yang memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada peserta didik dalam menjalankan agama Islam seperti ekstrakurikuler Rohis, dan lain-lain.

Adapun pengertian budaya Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pikiran, akal, budi, atau kebiasaan (sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar untuk diubah). Budaya sekolah merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan dan norma-norma yang diterima secara bersama, serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran sebagai perilaku alami, dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman yang sama diantara seluruh unsur dan personil sekolah baik itu kepala sekolah/madrasah, guru, staf, siswa, dan jika perlu membentuk opini masyarakat yang sama dengan sekolah/madrasah.<sup>30</sup> Budaya yang dimaksud peneliti adalah budaya yang bersifat islami, yaitu budaya yang bersumber dari syariat Islam seperti shalat berjamaah, dan sebagainya.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengembangan integrasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMK N Jateng di Purbalingga?
2. Bagaimana pengembangan integrasi pendidikan antikorupsi dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMK N Jateng di Purbalingga?
3. Bagaimana pengembangan integrasi pendidikan antikorupsi dalam budaya sekolah di SMK N Jateng di Purbalingga?

---

<sup>30</sup> Abdurrahman R. Mala, "Membangun Budaya Islami di Sekolah", *Jurnal Irfani*, Vol. 11, No. 1, 2015, hlm. 3.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengembangan integrasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMK N Jateng di Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui pengembangan integrasi pendidikan antikorupsi dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMK N Jateng di Purbalingga.
- c. Untuk mengetahui pengembangan integrasi pendidikan antikorupsi dalam budaya sekolah di SMK N Jateng di Purbalingga.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Manfaat teoritis

Menambah wawasan dan khasanah keilmuan tentang pengembangan integrasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi siswa, sebagai tindakan antisipatoris terhadap perilaku korupsi dan menumbuhkan nilai-nilai antikorupsi dalam diri siswa.
- 2) Bagi guru, sebagai bahan acuan dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik sebagai tindakan antisipatoris korupsi.
- 3) Bagi sekolah, untuk menjadi bahan acuan dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi sehingga berdampak positif bagi kepribadian siswa.
- 4) Bagi peneliti, dapat memberikan pengalaman, ilmu pengetahuan, serta tambahan wawasan yang luas untuk mempersiapkan diri sebagai pendidik antikorupsi dalam proses pembelajaran.

## E. Kajian Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian sistematis tentang keterangan yang telah dikumpulkan dari pustaka-pustaka yang berhubungan dengan penelitian dan mendukung pentingnya penelitian ini dilakukan. Landasan ini ditegaskan agar suatu penelitian mempunyai arah yang jelas bagi penulis dan membantu dalam penelitian. Adapun yang menjadi bahan tinjauan skripsi ini adalah:

*Pertama*, Skripsi Lailatus Syarifah, UIN Maulana Malik Ibrahim (2014), “Penerapan Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SDI Riyadlul Mutadiin Kedok Turen Malang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendidikan antikorupsi di SDI Riyadlul Mubtadiin Kedok Turin Malang dilakukan guru dengan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi ke dalam materi yang akan diajarkan di dalam kelas. Guru menggunakan metode ceramah untuk memberikan penjelasan kepada siswa, metode *live in* yakni dengan memberikan pengalaman langsung dan metode demokratis yakni melibatkan anak dalam menemukan nilai-nilai hidup dalam pendampingan dan pengarahan guru. Selain itu, guru juga menggunakan metode keteladanan atau contoh langsung dan melakukan pembiasaan kepada siswa sehingga siswa langsung mengaplikasikan apa yang didapat di dalam kelas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Persamaan kajian penelitian yang dilakukan oleh saudari Lailatus dengan penulis adalah sama-sama mengkaji tentang pengembangan integrasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran. Sedangkan perbedaannya adalah selain pada tempat yaitu penelitian saudari Lailatus di SDI Riyadlul Mutadiin Kedok Turen Malang sedangkan penulis di SMK N Jateng di Purbalingga juga berbeda pada fokus kajiannya. Fokus kajian penelitian saudari Lailatus yaitu pada pengembangan integrasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sedangkan penulis fokus pada pengembangan integrasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti.

*Kedua*, Skripsi Lissa Soleh’atun Rosida, IAIN Purwokerto (2016) yang berjudul “Pendidikan Antikorupsi di SMA N 1 Sigaluh Banjarnegara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendidikan antikorupsi di SMA N 1

Sigaluh yaitu melalui integrasi ke dalam mata pelajaran dan dengan budaya sekolah dengan tidak membuat kurikulum tersendiri akan tetapi memasukan di dalam kurikulum yang telah ada. Nilai-nilai yang diterapkan dalam pembelajaran dan budaya sekolah telah sesuai dengan nilai yang digagas oleh Kementrian Pendidikan yaitu: kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, tanggung jawab, mandiri, adil, kesederhanaan, dan kemandirian. Persamaan kajian penelitian yang dilakukan oleh saudari Lisa dengan penulis adalah sama-sama mengkaji tentang pengembangan integrasi pendidikan antikorupsi. Sedangkan perbedaannya adalah selain pada tempat yaitu penelitian saudari Lissa di SMA N 1 Sigaluh Banjarnegara sedangkan penulis di SMK N Jateng di Purbalingga juga berbeda pada fokus kajiannya. Fokus kajian penelitian saudari Lissa yaitu pada pengembangan integrasi pendidikan antikorupsi secara keseluruhan di SMA N Sigaluh Banjarnegara sedangkan penulis hanya fokus pada pengembangan integrasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti.

*Ketiga*, penelitian Erlawana dalam jurnal Lantanida, Vol.5 No.1, 2017 yang berjudul “Integrasi Nilai-nilai Antikorupsi pada Mata Pelajaran Kimia melalui Metode Media *Game* Ular Tangga”. Hasil Penelitian menunjukan bahwa nilai-nilai antikorupsi dapat diintegrasikan pada mata pelajaran Kimia dengan cara disisipkan melalui media *game* tangga sesuai dengan kurikulum 2013 dengan penilaian secara autentik. Pada penilain sikap hanya ada satu siswa yang memperoleh nilai sikap dengan predikat C, untuk penilaian psikomotor siswa tuntas seluruhnya, sedangkan pada penilaian kognitif ada 4 siswa yang belum mencapai KKM 2,66 (B) dengan presentase ketuntasan belajar siswa pada materi Ikatan Kimia mencapai 84%. Game ular tangga juga dapat menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada peserta didik, hal ini dapat dilihat bahwa dalam proses pembelajaran setiap peserta didik telah menunjukan nilai antikorupsi jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli. Persamaan kajian penelitian yang dilakukan oleh saudara Erlawana dengan penulis adalah sama-sama mengkaji tentang pengembangan integrasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran.

Sedangkan perbedaannya adalah selain pada tempat yaitu penelitian saudara Erlawana di SMA N 13 Kota Banda Aceh sedangkan penulis di SMK N Jateng di Purbalingga juga berbeda pada fokus kajiannya. Fokus kajian penelitian saudara Erlawana yaitu pada pengembangan integrasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran kimia sedangkan penulis fokus pada pengembangan integrasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar, penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

Bagian awal dari skripsi ini meliputi: halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, halaman motto, halaman persembahan, abstrak, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan, dan daftar lampiran.

Bagian utama skripsi ini memuat pokok-pokok permasalahan yang diuraikan dalam bab I sampai bab V, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus kajian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi landasan teori penelitian yang terdiri dari 3 sub bab. Sub bab pertama membahas tentang pendidikan antikorupsi, sub bab kedua membahas tentang PAI dan Budi Pekerti, dan sub bab ketiga membahas integrasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti.

Bab III berisi metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan hasil dari penelitian yang terbagi menjadi 3 sub bab. Sub bab pertama berisi tentang gambaran umum SMK N Jateng di Purbalingga yang meliputi sejarah sekolah, lokasi sekolah, visi, misi, dan tujuan sekolah, pengelolaan kelembagaan sekolah, program keahlian

sekolah, kegiatan kesiswaan, struktur organisasi sekolah, data tenaga pendidik dan kependidikan sekolah, data siswa, dan data sarana dan prasarana sekolah. Sub bab kedua berisi tentang penyajian data dari integrasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Sub ketiga berisi tentang analisis data dari integrasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti.

Bab V yaitu penutup, berisi tentang simpulan, saran, dan kata penutup.

Bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di SMK N Jateng di Purbalingga, melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai integrasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, integrasi pendidikan antikorupsi dalam ekstrakurikuler, dan integrasi pendidikan antikorupsi dalam budaya sekolah, secara garis besar dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Integrasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti dilakukan melalui pengembangan materi, metode, media, langkah-langkah/proses pembelajaran, pemberian nasihat, pemberian contoh-contoh perilaku antikorupsi, dan keteladanan. Melalui pengembangan materi yaitu dengan menayangkan video tentang korupsi. Melalui pengembangan metode dengan menerapkan metode ceramah dan diskusi. Pengembangan media dengan menayangkan video yang berkaitan dengan nilai-nilai antikorupsi. Melalui pengembangan proses/langkah-langkah pembelajaran dengan mengecek kehadiran siswa, kebersihan kelas, kerapian baju, kesiapan mengikuti pelajaran, wajib membawa buku paket PAI dan Budi Pekerti dan catatan kulum, dilarang menyontek saat ulangan dan mengantuk saat pembelajaran. Melalui nasihat dan pemberian contoh-contoh perilaku antikorupsi dengan memberi nasihat dan contoh-contoh perilaku peduli terhadap teman, hidup sederhana, dan sebagainya. Melalui keteladanan dengan guru memberikan keteladanan disiplin terhadap waktu dengan datang mengajar tepat waktu. Nilai-nilai antikorupsi yang ditanamkan antara lain; nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kemandirian, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, nilai kerja keras, nilai kesederhanaan, nilai keberanian, dan nilai keadilan.
2. Integrasi pendidikan antikorupsi dalam ekstrakurikuler yaitu ekstrakurikuler Rohis dilaksanakan dengan memberikan pemahaman dan penanaman nilai-

nilai antikorupsi dalam kegiatan Rohis yaitu pengajian, kultum dan khutbah, shalat wajib dan tahajud berjamaah, infaq, dan pemilihan dan kepengurusan Rohis. Nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang ditanamkan dalam ekstrakurikuler Rohis antara lain; nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kemandirian, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, nilai kerja keras, nilai kesederhanaan, nilai keberanian, dan nilai keadilan.

3. Integrasi pendidikan antikorupsi dalam budaya sekolah dilakukan melalui pojok/kantin kejujuran, kegiatan cinta lingkungan, pesan antikorupsi, tugas piket, lomba-lomba bertemakan antikorupsi, Inspeksi mendadak (sidak), dan pemberian sanksi/hukuman. Nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang ditanamkan dalam budaya sekolah antara lain; nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kemandirian, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, nilai kerja keras, nilai kesederhanaan, nilai keberanian, dan nilai keadilan.

## **B. Saran**

Tanpa mengurangi rasa hormat dan bukan bermaksud untuk menggurui, berdasarkan hasil penelitian ini maka dengan segala kerendahan hati izinkanlah peneliti memberikan beberapa masukan atau saran mengenai integrasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMK N Jateng sebagai berikut:

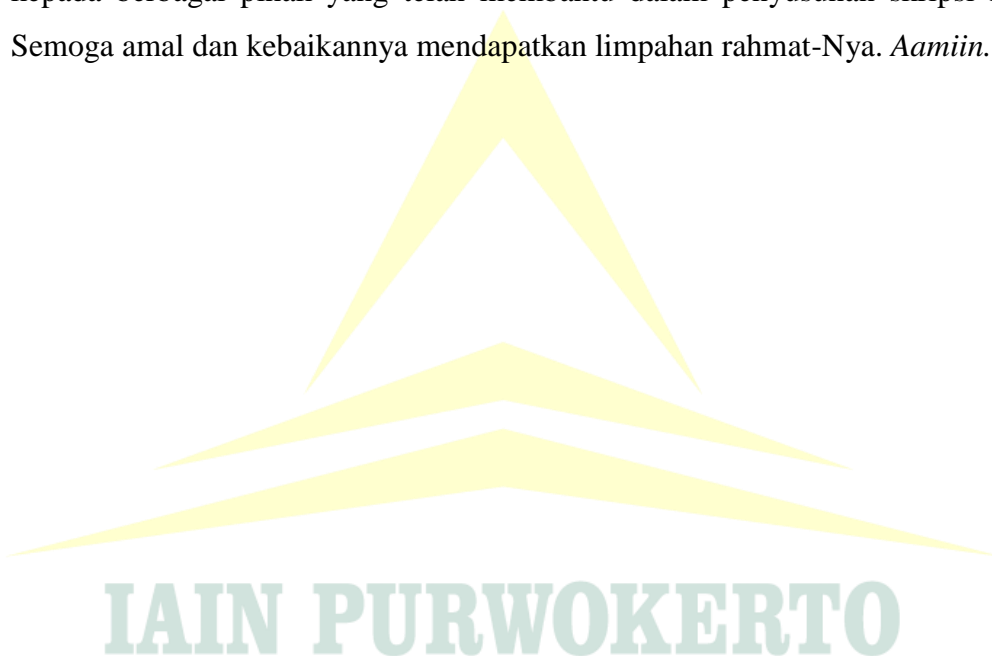
1. Bagi Guru, diharapkan selalu konsisten menerapkan, mengondisikan, dan memberikan keteladanan dalam menerapkan pendidikan antikorupsi serta mempelajari pendidikan antikorupsi lebih dalam agar mudah dalam melakukan pengintegrasian.
2. Bagi siswa, diharapkan selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran, menaati peraturan, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

## **C. Kata Penutup**

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat karunia dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun terdapat beberapa kendala yang harus penulis hadapi.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad saw, yang membawa umat manusia menuju *rahmatan lil'alam*. Penulis sudah berusaha yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dalam diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca untuk dijadikan sebagai bahan perbaikan, evaluasi dan tindak lanjut dari skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga amal dan kebaikannya mendapatkan limpahan rahmat-Nya. *Aamiin*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2019. "Harta Pusaka dalam Kejujuran Didi Karyadi", <http://www.greatpeople.iss.co.id/articles/99/harta-pusaka-dalam-kejujuran-didi-suryadi> diakses pada hari Kamis, 21 Mei 2020, pukul 10.00 WIB.
- Anwar, Syaiful. 2014. *Desain Pendidikan Agama Islam Konsep dan Aplikasinya dalam Pembelajaran di Sekolah*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Arifin, Zainal. 2012. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dharin, Abu. 2018. *Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Ibtidaiyah*. Yogyakarta: Lontar Mediatama.
- Erlangga, Yugha. 2014. *Panduan Pendidikan Antikorupsi*. Jakarta: Erlangga.
- Fathurrohman, Muhammad. 2015. *Budaya Religius dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Tinjauan Teoritik dan Praktik Kontekstualisasi Pendidikan Agama di Sekolah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Hadi, Sutrisno. 1991. *Metodologi Reseach*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Haedari, Amin. 2010. *Pendidikan Agama di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Halimatussa'diah, Choirunnia. 2017. "Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan dalam Menanamkan Nilai Religius Peserta Didik di MI Jati Salim Gombang Pakel Tulungagung", Skripsi. Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Herdiansyah, Haris. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hiariej, Eddy O.S. "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 31, No. 1.
- Inriyanin, Yayan, dkk. 2017. "Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler terhadap Prestasi Belajar IPS Melalui Motivasi Belajar", *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*. Vol. 2, No. 7.

- Jurnalis. 2019. "KPK: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Harusnya dia Atas 50 Poin", <https://nasional.okezone.com/amp/2019/0817/337/2093172/kpk-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-harusnya-di-atas-50-poin?page=2> diakses pada Rabu, 18 Desember 2019, pukul 10.00 WIB.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. tt. *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Madrasah*. t.k.: t.p.
- Majid, Abdul dan Dian Andayani. 2006. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mala, Abdurrahman R. 2015. "Membangun Budaya Islami di Sekolah", *Jurnal Irfani*. Vol. 11, No. 1.
- Mansyur, Ipin Aripin. 2012. "Pengintegrasian Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran Ekstrakurikuler Mitra Citra Remaja (MCR) sebagai Upaya Pembinaan Akhlak Mulia di MAN Kiarakuda Ciawi Tasikmalaya", Tesis. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Muhaimin. 2002. *Paradigma Pendidikan Islam, (Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustopa. 2017. "Budaya Sekolah Islami (Busi) : Studi Kasus di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang", *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 11, No. 2.
- Nida, Wardatun. 2015. "Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran PAI di SMA Negeri 7 Yogyakarta", Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Nilawati. 2014. "Keterlibatan Perempuan dalam Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang", *Jurnal Intizar*. Vol. 20, No. 2.
- Prastowo, Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rosikoh, Chatrina Darul dan Dessy Marliani Listianingsih. 2016. *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sa'i. 2017. "Penanaman Rasa Tabu Korupsi pada Sekolah Dasar", *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*. Vol. 4, No. 2.
- Sakinah, Nuzus dan Nuhasanah Bakhtiar. 2019. "Model Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih dan Berintegritas Sejak Dini Ahmad Zuber", *Journal of Primary Education*. Vol. 2, No. 1.

- Setiadi, Wicipto. 2018. "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi)", *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15, No. 3.
- Sholichah, Aas Siti. 2018. "Teori-Teori Pendidikan dalam Al-Qur'an" *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1.
- Subagyo, P. Joko. 1997. *Metodologi Penelitian Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Syah, Muhibbin. 2014. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Taja, Nadri dan Helmi Aziz. "Mengintegrasikan Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. XIII No. 1 2016.
- Tambak, Syahraini. 2014. *6 Metode Ilmiah dan Inovatif Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wibowo, Agus. 2013. *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarni, Endang Widi. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*. Jakarta: Bimi Aksara.
- Wiyani, Novan Ardy. 2013. *Konsep, Praktik, & Strategi Membumikan Pendidikan Karakter di SD*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Zuber, Ahmad. 2018. "Strategi Antikorupsi melalui Pendekatan Pendidikan Formal dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)", *Journal of Development and Social Change*. Vol. 1, No. 2.
- Zulfa, Umi. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Cahaya Ilmu.
- Zulfa, Umi. 2014. *Modul Teknik Kilat Penyusunan Proposal Skripsi*. Cilacap: Ihya Media.

### **Wawancara**

Bagas selaku siswa kelas XI SMK N Jateng di Purbalingga. Pada hari Sabtu, 8 Mei 2020, pukul 14.00 WIB. *Online*.

Bapak Juwani selaku Kepala Sekolah SMK N Jateng di Purbalingga. Pada hari Senin, 7 Januari 2020, pukul 09.00 WIB. Di SMK N Jateng di Purbalingga.

Bapak Roni selaku guru mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMK N Jateng di Purbalingga. Pada hari Kamis, 12 Desember 2019, pukul 08.30 WIB. Di SMK N Jateng di Purbalingga.

Bapak Roni selaku guru mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas X SMK N Jateng di Purbalingga. Pada hari Jum'at, 10 April 2020, pukul 10.00 WIB. *Online*.

Bapak Roni selaku guru mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti SMK N Jateng di Purbalingga. Pada hari Rabu, 8 April 2020, pukul 12.00 WIB. *Online*.

Bapak Roni selaku guru mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti SMK N Jateng di Purbalingga. Pada hari Rabu, 6 Mei 2020, pukul 08.00 WIB. Di SMK N Jateng di Purbalingga.

Bapak Roni selaku Pembina Rohis Putra SMK N Jateng di Purbalingga. Pada hari Rabu, 6 Mei 2020, pukul 08.00 WIB. Di SMK N Jateng di Purbalingga.

Bapak Salamun selaku Waka Kesiswaan SMK N Jateng di Purbalingga. Pada hari Jum'at, 3 April 2020, pukul 08.00 WIB. Di SMK N Jateng di Purbalingga.

Bapak Salamun selaku Waka Kesiswaan SMK N Jateng di Purbalingga. Pada hari Rabu, 29 April 2020, pukul 08.00 WIB. Di SMK N Jateng di Purbalingga.

Fatimah selaku siswa kelas X SMK N Jateng di Purbalingga. Pada hari Sabtu, 9 Mei 2020, pukul 07.00 WIB. *Online*.

Ibu Azizah selaku guru SMK N Jateng di Purbalingga. Pada hari Selasa, 5 Mei 2020, pukul 09.00 WIB. Di SMK N Jateng di Purbalingga.

Ibu Rini selaku guru mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas XI SMK N Jateng di Purbalingga. Pada hari Selasa, 7 April 2020, pukul 11.30 WIB. Di SMK N Jateng di Purbalingga.

Ibu Suwari selaku Pembina Rohis Putri SMK N Jateng di Purbalingga. Pada hari Sabtu, 25 April 2020, pukul 10.00 WIB. *Online*.

Qorib selaku siswa kelas XII SMK N Jateng di Purbalingga. Pada hari Sabtu, 25 April 2020, pukul 17.00 WIB. *Online*.